

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Tanggul Laut Terancam Mangkrak

Pihak swasta menunggu kepastian dari pemerintah Jakarta.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Proyek tanggul fase darurat National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta terancam mangkrak. Sebab, sejumlah perusahaan tak kunjung membangun tanggul penahan banjir rob itu. Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan proyek senilai Rp 9,06 triliun itu rampung pada 2019.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Firdaus Ali, menuduh pemerintah DKI Jakarta sebagai penyebab mangkraknya pembangunan tanggul raksasa tersebut. Menurut dia, pemerintah Jakarta tak kunjung menegih komitmen perusahaan untuk membangun tanggul fase darurat tersebut. "Komitmen DKI tidak bisa pegang. Jadi menghambat investasi," kata Firdaus dua hari lalu.

Firdaus menjelaskan, tanggul fase darurat sepanjang 20,1 kilometer seharusnya dibangun pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Kementerian Pekerjaan Umum hampir menuntaskan pembangunan 25 persen tanggul tersebut. Adapun pembangunan 75 persen sisanya merupakan tanggung jawab pemerintah DKI dan pihak swasta.

Menurut Firdaus, perusahaan belum merealisasi pembangunan tanggul lanjaran pemerintah Jakarta tak kunjung mengesahkan peraturan daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan tata ruang pantai utara Jakarta. "Swasta tak

mendapatkan kepastian. Bagaimana mereka akan menunaikan kewajibannya?" kata dia.

Firdaus juga mengingatkan bahwa kebutuhan membangun tanggul darurat sangat mendesak. Sebab, dari waktu ke waktu permukaan tanah di pesisir Jakarta terus turun. Adapun limpasan air laut ke daratan semakin tinggi.

Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu NCICD PUPR, Sudarto, mengatakan hal senada. Menurut dia, pemerintah pusat tak bisa memaksa pihak swasta membangun tanggul karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah Jakarta.

Sudarto memperkirakan banjir rob yang kerap melanda pesisir Jakarta bakal semakin parah bila tanggul fase darurat tak dibangun. Dia mencontohkan, di sekitar Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Penjaringan, banyak gedung bagus yang rusak karena terendam air laut. Di Muara Angke dan Cilincing, menurut dia, kondisi juga semakin kritis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, membenarkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berbagi tugas untuk membangun tanggul laut NCICD. Tahun depan, pemerintah Jakarta menganggarkan Rp 146,1 miliar untuk pembangunan tanggul sepanjang 1,2

kilometer di dua tempat. Pertama, tanggul di Kali Blenceng sepanjang 1 kilometer dengan anggaran Rp 115,5 miliar. Kedua, tanggul di Kali Kamal sepanjang 284 meter dengan anggar-

an Rp 30,6 miliar.

Tuty tak bisa memastikan kapan pemerintah Jakarta akan mengkoordinasi perusahaan pengembang untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. "Aku tahunya yang anggaran APBD saja," ujar dia.

Sedikitnya, ada 15 perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah yang wajib membangun tanggul di pantai utara Jakarta. Salah satunya PT Kapuk Naga Indah, pengembang reklamasi Pulau C dan D, yang harus membangun tanggul sepanjang 11,2 kilometer dari Muara Angke hingga Kamal Muara.

Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah Jakarta. "Kami belum dapat info," ujar dia, kemarin. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Tanggul Laut Terancam Mangkrak

Berbagi Tugas di Fase Darurat

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah membagi kewajiban pembangunan tanggul laut fase darurat sepanjang 20,1 kilometer dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) kepada sejumlah pihak. Berikut ini rincian kewajibannya.

I. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Kewajiban: 4,5 kilometer.

Lokasi: Kalibaru dan Muara Baru.

Kemajuan: pembangunan mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada 2018.

II. Pemerintah DKI Jakarta

Kewajiban: 1,2 kilometer

Lokasi: Kali Blencong dan Kali Kamal Muara.

Kemajuan: mengalokasikan dana Rp 146,1 miliar untuk pembangunan mulai tahun depan.

III. Perusahaan

Kewajiban: 14,4 kilometer sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah daerah.

Lokasi: menyebar

Kemajuan: nihil Perusahaan (Kewajiban)

- PT Kapuk Naga Indah (11,2 kilometer)

- Agung Podomoro Group (773 meter)

- TIC (3,8 km)

- Tangerang (580 meter)

- Muara Angke (446 meter)

- PLN Muara Karang (756 meter)

- PT Intiland (1,4 km)

- PT Bogasari (1 km)

- Nizam Zachman (1,2 km)

- Pelindo SK (4,5 km)

- Pelindo TP (5,1 km)

- PT DKB (923 meter)

- Port Kalibaru (434 meter)

- PT PJA (7,1 km)

- TPCT (952 meter)

- Marunda Ctr (2,8 km)

- PLN Muara Tawar (1,2 km)

- Bekasi (6,6 km)

- Kawasan Berikat Nusantara (3,6 km)

ANCAMAN BANJIR LAUT

Air laut kerap membanjiri sejumlah tempat di Jakarta Utara. Lokasi yang terbilang kritis dan sangat kritis antara lain :



● TEKS: AVIT HIDAYAT | SUMBER: BAPPENAS, 2016